



PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

LAKIP | 2023

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

BAPPEDA
KOTA PEMATANGSIANTAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Sepanjang Tahun 2023, Bappeda telah melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Terlaksananya penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan ini merupakan kerja keras dan dukungan para seluruh *stakeholder* yang terkait dengan Bappeda Kota Pematangsiantar. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan untuk waktu yang akan datang, terlebih dalam upaya pencapaian Visi Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar terhadap seluruh akuntabilitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, sehingga proses pembangunan dapat dilaksanakan secara transparan, terbuka, jujur dan akuntabel. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini tidak luput dari kekurangan sehingga diharapkan saran dan masukan untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang membantu pelaksanaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini, kami ucapkan terima kasih yang tulus semoga Allah SWT menerimanya sebagai amal ibadah, Amin.

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR,

DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19811130 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Penjelasan Umum Organisasi.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3 Data Umum Organisasi	9
1.3.1 Personil	9
1.3.2 Sarana dan Prasarana	10
1.3.3 Pembiayaan	13
1.4 Isu Strategis	14
1.4.1 Landasan Hukum	14
1.4.2 Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Indikator Kinerja Utama	22
2.3 Rencana Strategis	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	31
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	36
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)	37
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan	38
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	46
3.2 Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	55
4.2 Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja	56
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Bappeda Kota Pematangsiantar Berdasarkan Pangkat, Golongan, Pendidikan, Gender	9
Tabel 1.2	Daftar Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, Tahun 2023	10
Tabel 1.3	Daftar Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023	13
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 (sesuai Renstra)	20
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Jangka Menengah Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 (sesuai Renstra)	21
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pematangsiantar	23
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja 2023 ESELON II Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	25
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja 2023 Eselon III Sekretaris	26
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja 2023 Eselon III Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi	26
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja 2023 Eselon III Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya	27
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja 2023 Eselon III Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana	28
Tabel 2.10	Perjanjian Kinerja 2023 Eselon III Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi	28

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja 2023 Eselon IV Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian	29
Tabel 2.12 Perjanjian Kinerja 2023 Eselon IV Kepala Sub Bagian Keuangan	29
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023	32
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023	32
Table 3.4 Realisasi Kinerja sesuai dengan Program dan Kegiatan untuk Sekretariat dan Bidang tahun 2023	33
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2021-2023	35
Tabel 3.6 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	36
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar dengan Beppenas	37
Tabel 3.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
Tabel 3.9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	50
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023	52
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Untuk Sekretariat dan Bidang Per Program dan Kegiatan	53
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran per Sasaran	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Pematangsiantar	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mempresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam rangka mewujudkan good governance, berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang strategis, sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam Menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur,legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar menyusun LAKIP Tahun 2023 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2022, dapat mempertanggungjawabkan kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar kepada Wali Kota Pematangsiantar dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Bappeda untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar di tahun selanjutnya.

Bappeda adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di Bidang Pemerintahan. Sesuai dengan Pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari UndangUndang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks Undang-Undang tersebut di lakukan amandemen yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah amandemen yang kedua. Pengertian pemerintah daerah di atur dalam Bab 1 pasal 1 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Pemerintah Daerah

adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembuat dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, pemerintah daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintahan daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah.

Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengontrolan. Oleh sebab itu Bappeda sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggungjawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala Bappeda.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Pematangsiantar diatur pada Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pematang Siantar merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar yang melaksanakan urusan perencanaan penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan unsur pemerintahan yang meliputi perencanaan, penelitianm, dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan Kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis yang meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar dibantu oleh :

- I. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan;

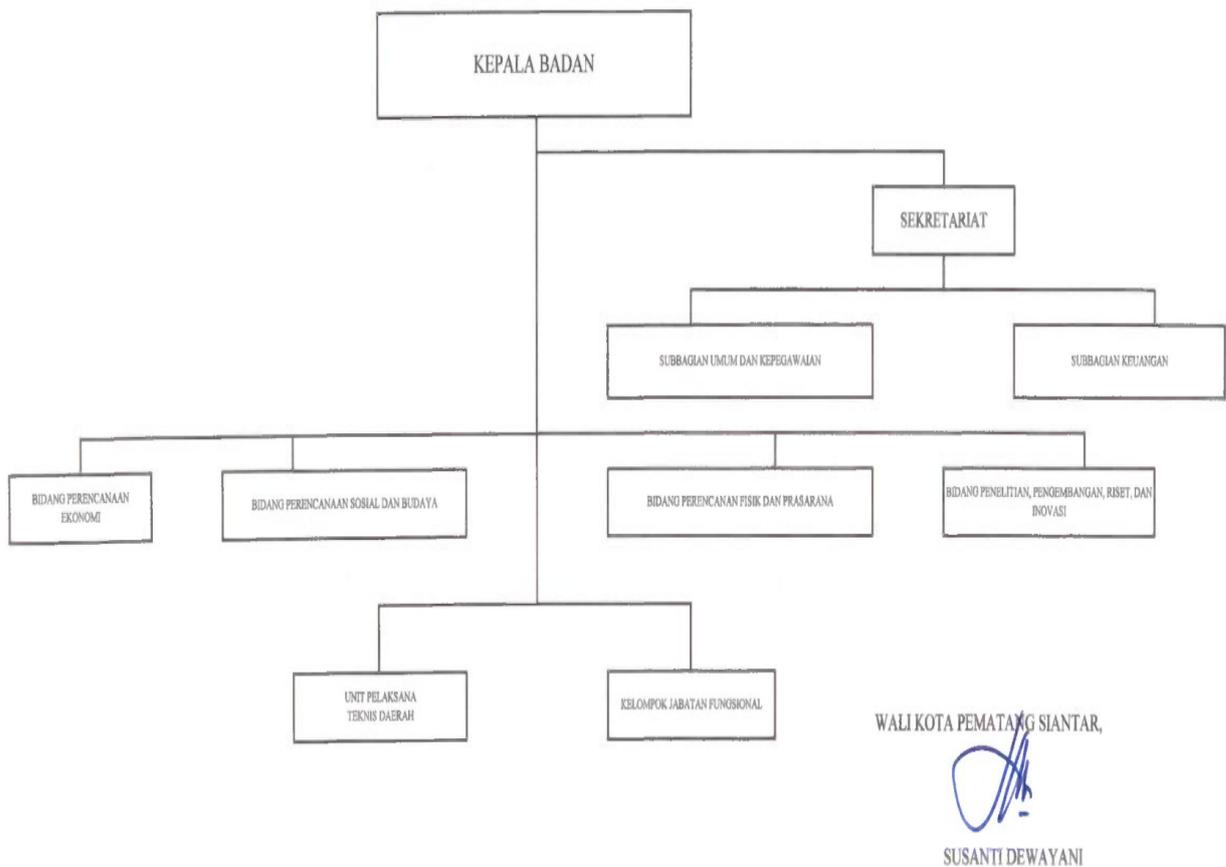
- d. Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang di lingkungan Badan;
 - e. Pengoordinasian program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai terkait tugas dan fungsinya.
- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ketatausahaan mengagendakan surat menyurat, pendistribusian surat menyurat, pengarsipan surat menyurat, hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
 - b. Menyelenggarakan manajemen rumah rangka, pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi aset di lingkungan Badan;
 - c. Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian dan koordinasi pembinaan pegawai di lingkungan Badan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.
 - 2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
 - b. Menyelenggarakan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan penggajian pegawai; dan
 - c. Melakukan pelaporan keuangan serta tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Badan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.
- II. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perencanaan dan penganggaran pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan serta kerjasama ekonomi. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan penganggaran serta koordinasi program/kegiatan pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan serta kerjasama ekonomi; dan
 - b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

- III. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi perencanaan dan penganggaran pendidikan, kesehatan dan pemerintahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan serta koordinasi program/kegiatan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan; dan
 - b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
- IV. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi perencanaan dan penganggaran pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan penganggaran serta koordinasi program/kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
 - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
- V. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, pengembangan wilayah perkotaan, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan Perencanaan Bidang Penelitian Pengembangan;
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis Penelitian dan Pengembangan;

- c. Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan serta Inovasi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan dan Koordinasi Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitasi riset dan inovasi dan pemanfaatan riset dan inovasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, inovasi dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Hubungan hirarki pelaksanaan tugas dan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar yang dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional digambarkan dalam struktur organisasi dibawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Pematangsiantar



Sumber : Perwa No 27 Tahun 2022

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dimaksud sebagai pedoman/acuan bagi bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan kebijakan, mengelola kinerja mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, guna mengukur tingkat keberhasilan atas visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja ditujukan untuk:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Bappeda kepada Walikota Pematangsiantar dan pihak berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

2. Meningkatkan akuntabilitas Bappeda Kota Pematangsiantar.
3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dan kredibilitas Bappeda Kota Pematangsiantar terhadap pemberi delegasi wewenang.
4. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungan.
5. Untuk dapat mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

1.3 Data Umum Organisasi

1.3.1 Personil

Jumlah pegawai Bappeda Kota Pematangsiantar sebanyak 43 orang PNS dan 7 orang Tenaga Harian Lepas (THL), total Pegawai 50 orang dengan rincian sesuai sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Bappeda Kota Pematangsiantar Berdasarkan Pangkat, Golongan Pendidikan, Gender

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Jumlah Pegawai dirinci menurut Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	12 25 6 0	
2	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan : a. S2, S3 b. S1 c. D3 d. SMU e. SLTP f. SD	16 20 - 14 - -	
3	Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV	1 5 2	
4	Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan Fungsional : a. Jabatan Fungsional Perencana b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan c. Jabatan Fungsional Peneliti	15 1 -	
5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender a. Laki-laki	30	

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
	b. Perempuan	20	
6	Jumlah PNS Keseluruhan	43	
7	Jumlah Tenaga Harian Lepas`	7	
	Jumlah Total	50	

Sumber Data : DUK Bappeda Kota Pematangsiantar 2023

1.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, adapun Sarana dan Prasarana yang kami sampaikan pada laporan ini sebagaimana Tabel Data Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 di bawah ini :

Tabel 1.2
Daftar Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, Tahun 2023

NO	SKPD	BARANG (UNIT)		
	JENIS SARANA PRASARANA	BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	385,44 M ²		385,44 M ²
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	38,28 M ²		38,28 M ²
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	38,28 M ²		38,28 M ²
4	Bangunan Tempat Parkir	87,87 M ²		87,87 M ²
5	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	36 M		36 M
6	Mobil	3 Unit		3 Unit
7	Sepeda Motor	17 Unit		17 Unit
8	Reciver		6 Unit	6 Unit
9	Global Positioning System		6 Unit	6 Unit

NO	SKPD	BARANG (UNIT)		
	JENIS SARANA PRASARANA	BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
10	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)		1 Unit	1 Unit
11	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2 Unit		2 Unit
12	Lemari Besi/Metal	9 Unit		9 Unit
13	Lemari Kayu	3 Unit		3 Unit
14	Rak Besi	1 Unit		1 Unit
15	Filing Cabinet Besi	34 Unit		34 Unit
16	Brandkas	1 Unit		1 Unit
17	White Board	9 Unit		9 Unit
18	Alat Penghancur Kertas	2 Unit		2 Unit
19	Mesin Absensi		1 Unit	1 Unit
20	Display	1 Unit		1 Unit
21	Alat Kantor Lainnya	6 Unit		6 Unit
22	Meja Kerja Kayu	52 Unit		52 Unit
23	Kursi Besi/Metal	132 Unit		132 Unit
24	Meja Rapat	14 Unit		14 Unit
25	Meja Bundar	5 Unit		5 Unit
26	Kursi Rapat	112 Unit		112 Unit
27	Kursi Putar	31 Unit		31 Unit
28	Kursi Biasa	5 Unit		5 Unit
29	Kursi Lipat	22 Unit		22 Unit
30	Sofa	1 Set		1 Set
31	A.C. Window	15 Unit		15 Unit
32	A.C. Split	9 Unit		9 Unit
33	Kipas Angin	7 Unit		7 Unit
34	Televisi	9 Unit		9 Unit
35	Sound System	1 Unit		1 Unit
36	Wireless	2 Unit		2 Unit
37	Microphone	10 Unit		10 Unit
38	Unit Power Supply	2 Unit		2 Unit

NO	SKPD	BARANG (UNIT)		
	JENIS SARANA PRASARANA	BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
39	Stabilisator	2 Unit		2 Unit
40	Camera Video	2 Unit		2 Unit
41	Camera Film	1 Unit		1 Unit
42	Lambang Garuda Pancasila	3 Unit		3 Unit
43	Tangga Alumunium	2 Unit		2 Unit
44	Dispenser	6 Unit		6 Unit
45	Meja Kerja Pejabat Eselon II, III, IV dan Pejabat Lainnya	22 Unit		22 Unit
46	Meja Rapat Pejabat Lainnya	3 Unit		3 Unit
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II, III dan IV	15 Unit		15 Unit
48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 Unit		3 Unit
49	Peralatan studio audio lainnya (dst)	1 Unit		1 Unit
50	Camera Electronic	2 Unit		2 Unit
51	Camera Film	1 Unit		1 Unit
52	Layar Film/Projector	6 Unit		6 Unit
53	Video Confrence	1 Unit		1 Unit
54	Alat Studio Video Lainnya	1 Unit		1 Unit
55	Pesawat Telephone	2 Unit		2 Unit
56	Facsimile	1 Unit		1 Unit
57	Antena SHF Portable	1 Unit		1 Unit
58	Peralatan Antena SHF/Parabola lainnya (dst)	1 Unit		1 Unit
59	Bracket Holder	1 Unit		1 Unit
60	Stabilizer	2 Unit		2 Unit
61	Layar	1 Unit		1 Unit
62	Pita Ukuran (Meteran)	4 Unit		4 Unit
63	P.C. Unit	7 Unit		7 Unit
64	Laptop	55 Unit	10 Unit	65 Unit
65	Tablet PC	2 Unit		2 Unit
66	Hard Disk	5 Unit		5 Unit

NO	SKPD	BARANG (UNIT)		
	JENIS SARANA PRASARANA	BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30 Unit		30 Unit
68	External Hardisk	8 Unit		8 Unit
69	Modem	1 Unit		1 Unit

Data : Kartu Inventaris Barang (KIB) Bappeda Tahun 2023

1.3.3 Pembiayaan

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana dalam Tabel Daftar Anggaran Belanja terlampir :

Tabel 1.3
Daftar Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023

NO	Program dan Kegiatan	Pembiayaan	%
1	2	7	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	5.617.403.599	68,75
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.136.455	0,27
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.958.166.461	48,44
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.298.460	5,66
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.621.823	4,67
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	477.247.400	5,84
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.933.000	3,87
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	795.384.833	9,73
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	619.606.517	7,58
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	31.089.585	0,38
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	144.688.731	1,77
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	551.171.433	6,75
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	187.102.406	2,29
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	113.255.947	1,39
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	250.813.080	3,07
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.206.482.731	14,77
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.150.000.000	14,08
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	56.482.731	0,69
		8.170.442.596	100,00

Sumber Data: DPA Bappeda Kota Pematangsiantar 2023

1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kota Pematangsiantar jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Kota Pematangsiantar yaitu:

- a. Optimalisasi penggunaan data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP.
- c. Keterhubungan dan sinkronisasi (*link and match*) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan pembangunan.
- d. Pengembangan sistem inovasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan.

1.4.1 Landasan Hukum

LAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012–2032;
9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023.
12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023.

1.4.2 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Data Umum Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran yang mendukung terwujudnya kinerja yang akuntabel.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan Keberhasilan dan Kegagalan, Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta langkah antisipatif dan Strategi Pemecahan Masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi Pemerintah Kota Pematangsiantar Visi Kota Pematang Siantar tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2022 adalah **"Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas"**.

Indikasi terwujudnya pencapaian tersebut dimaknai dengan:

- 1. Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemic Covid – 19.
- 2. Sejahtera** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid 19.
- 3. Berkualitas** : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa responsive serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Sub Pusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi *hinterland*.

Upaya perwujudan Visi tersebut di atas diharapkan dapat dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan heterogenan yang berkualitas.
Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar regional, perekonomian.
2. Memperkuat dan memulihkan penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi atau paska pandemi Covid 19.
Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance dan corporate governance*.
Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang professional .
4. Meningkatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.
Bertujuan untuk mewujudkan cita cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.
5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, kebersihan dan infrastruktur, keindahan pengembangan lingkungan kota secara berkelanjutan.
Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Berdasarkan urusan kewenangan yang dimiliki, Bappeda berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam RPJMD sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Kota Pematangsiantar, yaitu sebagai instansi perencanaan pembangunan. Bappeda Kota Pematangsiantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar, terutama pada misi ke 3 (tiga) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance*. Pada misi ini terdapat satu tujuan, yaitu mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk tujuan ini ada 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja : a. Indeks Kepuasan Masyarakat, b. Indeks SPBE; 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja : a. Nilai SAKIP, b. Indeks IPKD; 3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan indikator kinerja : Derajat Desentralisasi Fiskal.

Dari ketiga sasaran RPJMD Kota Pematangsiantar diatas, Bappeda Kota Pematangsiantar mendukung sasaran kedua, meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pematangsiantar, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pematangsiantar yaitu : “Mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai Lembaga teknis bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Pematangsiantar. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang adalah :

- Bappeda sebagai institusi yang menjalankan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 25 tahun 20024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda menjadi lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan *tink tank*-nya pembangunan daerah.

- Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan program pembangunan.
- Tingginya kapasitas warga Kota Pematangsiantar belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan pembangunan, keterlibatan warga kota dalam forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga yang secara formal merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

Keberadaan Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Pematangsiantar
Tahun 2022-2027 (sesuai Renstra)

RPJMD	RENSTRA			
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Ke 3 : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Coorporate Governanace</i> .	Mewujudkan perencanaan yang akuntabel.	Nilai AKIP daerah komponen perencanaan dan pengukuran kinerja,	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan.	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan.
			Efektivitas pengendalian pembangunan daerah.	Persentase capaian pembangunan daerah.
			Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan.	Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah.

RPJMD	RENSTRA			
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah.	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah.

Sumber : Renstra Bappeda Kota Pematangsiantar 2022-2027

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Jangka Menengah Bappeda Kota Pematangsiantar
Tahun 2022-2027 (Sesuai Renstra)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal RENSTRA (2022)						Kondisi Akhir RENSTRA (2027)
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perencanaan yang akuntabel		Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja	14,83	17	18	19	20	21	21
			Nilai AKIP Daerah komponen pengukuran kinerja	9,06	12	14	14.75	15	15.25	15,25
		Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan.	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan.	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
		Efektivitas pengendalian pembangunan daerah.	Persentase capaian pembangunan daerah.	55%	65%	85%	90%	95%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal RENSTRA (2022)						Kondisi Akhir RENSTRA (2027)
					2023	2024	2025	2026	2027	
		Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan.	Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah.	65%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah.	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	A	B	B	A	A	A	A
			Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah.	75	75	75	80	80	85	85

Sumber : Renstra Bappeda Kota Pematangsiantar 2022-2027

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kota Pematangsiantar dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Indikator Kinerja Utama Bappeda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 dan Dokumen Renstra Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 telah beberapa kali dilakukan perubahan melalui SK Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dibawah ini disajikan Tabel Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pematangsiantar sesuai dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 800.1.11.1/012.a/Bapp/11/2023 tentang

Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pematangsiantar

No	Sasaran	Indikator	Target 2023
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan.	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan.	85 %
2	Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah.	Persentase Capaian Pembangunan Daerah.	85 %
3	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25

Sumber : Keputusan Kepala Bappeda Nomor 800.1.11.1/012.a/Bapp/11/2023

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam Rencana Strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

Dalam mekanisme manajemen Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kota Pematangsiantar, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar memiliki posisi strategis, tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang maksimal Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sumber Data: Renja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar pada tahun 2023 telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Visi-Misi yang tercantum didalam RPJMD Kota pematangsiantar Tahun 2022-2027. Dibawah ini di sajikan tabel Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar dan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023, terlampir.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja 2023 ESELON II
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan	85 %
2	Efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase Capaian Pembangunan Daerah	85 %
3	Meningkatkan Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	606.882.098	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	724.280.643	
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	34.835.822	
TOTAL		1.365.998.563	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala BAPPEDA Kota Pematangsiantar

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja 2023 Eselon III
Sekretaris

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,736,295,062	
TOTAL		5,736,295,062	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala BAPPEDA Kota Pematangsiantar

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja 2023 Eselon III
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD	75%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Perekonomian dan SDA	
2	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD).	85%

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75,044,015	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	461,732,385	
TOTAL		536,776,400	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala BAPPEDA Kota Pematangsiantar

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja 2023 Eselon III
Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	75%

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	87,102,328	
TOTAL		87,102,328	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala BAPPEDA Kota Pematangsiantar

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja 2023 Eselon III
Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85%
2	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	724,280,643	
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,150,000,000	
TOTAL		1,874,280,643	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala BAPPEDA Kota Pematangsiantar

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja 2023 Eselon III
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan, Riset dan Inovasi

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85%
2	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	606,882,098	
2	Program Penelitian dan Pengembangan	34,835,822	
TOTAL		641,717,920	

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja 2023 Eselon IV
Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,736,295,062	
TOTAL		5,736,295,062	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala BAPPEDA Kota Pematangsiantar

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja 2023 Eselon IIV
Kepala Sub Bagian Keuangan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,736,295,062	
TOTAL		5,736,295,062	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala BAPPEDA Kota Pematangsiantar

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan BAPPEDA Kota Pematangsiantar dengan berpedoman pada Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Pematangsiantar yang menjadi tugas BAPPEDA Kota Pematangsiantar. Capaian kinerja sasaran Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
76 % ≤ 90 %	Tinggi
66 % ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65 %	Rendah
≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Capaian kinerja indikator tujuan diperoleh berdasarkan indikator kinerja tujuan. Perumusan indikator tujuan lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Secara rincian capaian masing-masing indikator kinerja tujuan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
1	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja	17	20,84	122,58
2	Nilai AKIP Daerah komponen pengukuran kinerja	12	15,08	125,67
Rata-rata Kinerja				124,12

Sumber Data: Evaluasi Renja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari 2 indikator tujuan yang telah ditetapkan, keduanya memperoleh realisasi yang melampaui target dengan kriteria sangat tinggi. Pencapaian indikator tujuan yang melampaui target ini dipengaruhi beberapa faktor yang akan dijelaskan pada sub bab 3.1.5 halaman 38-39.

Selanjutnya berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Bappeda Kota Pematangsiantar telah menetapkan 3 (tiga) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2023, untuk selanjutnya akan dilakukannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2023 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan.	85 %	99,58%	117,16
2	Persentase Capaian Pembangunan Daerah.	85 %	85,71%	100,83
3	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25 %	25,76	103,04
Rata-rata Kinerja				107,01

Sumber Data : Evaluasi Renja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari 3 indikator sasaran yang telah ditetapkan, semuanya memperoleh realisasi yang melampaui target dengan kriteria sangat tinggi dan rata-rata 107,01 %. Pencapaian indikator sasaran kinerja dipengaruhi beberapa faktor yang akan dijelaskan pada sub bab bab 3.1.5 halaman 38-39.

Selanjutnya realisasi Kinerja sesuai dengan Program dan Kegiatan untuk Sekretariat dan Bidang Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja sesuai dengan Program dan Kegiatan untuk Sekretariat dan Bidang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat				
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	CC	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75	77,86	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Bidang Perencanaan Ekonomi				
	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD Bidang Perekonomian dan SDA	75%	80%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD)	85%	100%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
3	Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya				

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap Rentra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	75%	99,26%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4	Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana				
	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85%	94,51 %	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan	Niali Indeks Inovasi Daerah	25	25,76	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5	Bidang Penelitian Pengembangan, Riset dan Inovasi				
	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85%	na	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25	25,76	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sumber Data : Evaluasi Renja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Dikarenakan adanya Perubahan Perjanjian Kinerja pada tahun 2023, sehingga mengakibatkan perubahan sasaran dan indikator kinerja, maka dibawah ini disajikan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021 dengan dengan dua kriteria yaitu untuk indikator yang sama dibuat dalam baris tabel yang sama dan untuk indikator yang berbeda dibuat dalam baris table yang berbeda.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar
Tahun 2021-2023

NO	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3	4	7	
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan.	85 %	99,58%	69,5%	
2	Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah.	85 %	85,71%	45%	
3	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25	25,76		
4	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja;			19,84	
5	Nilai AKIP Daerah komponen pengukuran kinerja			12,75	
8	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang Dijadikan Kebijakan Daerah			52%	60%
11	Persentase pelaksanaan e-planning				100%
12	Persentase usulan masyarakat yang ditampung dalam APBD				60%
13	Kesesuaian rencana Pembangunan dengan RTRW				80%
14	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				45,83%
15	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD				99,32%

Sumber Data : Evaluasi Renja BAPPEDA Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas tidak bisa membandingkan antara capaian kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir karena adanya perubahan sasaran dan indikator sasaran sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Sasaran dan indikator yang konsisten hanya hanya 2 yakni persentase keselarasan perencanaan pembangunan dan persentase realisasi capaian pembangunan daerah, itupun hanya di Tahun 2022 dan Tahun 2023. Dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja kedua indikator tersebut pada tahun 2023 meningkat sangat signifikan apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022.

Pada tahun 2023 terhadap sasaran meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan dilakukan perubahan indikator kinerja dan target dari sebelumnya persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah diubah menjadi nilai indeks inovasi daerah. Hal tersebut dilakukan karena adanya perubahan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Dimana sebelumnya salah satu bidang yakni Bidang Monitoring dan Litbang berubah menjadi Bidang Riset dan Inovasi dengan tugas dan fungsi yang baru. Dengan demikian Bappeda berperan untuk mendorong agar setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat melakukan inovasi baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan demikian nilai indeks inovasi daerah dapat meningkat setiap tahun.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Realisasi kinerja Tahun 2023 adalah pelaksanaan kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Realisasi kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET
		2023	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan.	85 %	99,58%	90%	95%	100 %
2	Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah.	85 %	85,71%	85%	90%	100 %
3	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25	25,76	Belum ditetapkan		

Berdasarkan tabel diatas jika dilihat dari target dan realisasi Tahun 2023, maka untuk indikator kinerja persentase keselarasan perencanaan pembangunan dan persentase realisasi capaian pembangunan daerah penetapan targetnya untuk tahun 2024 dan 2025 perlu ditinjau ulang, karena untuk tahun awal sendiri capaiannya sudah sangat tinggi. Sedangkan untuk tahun 2026 sudah cukup realistis bisa dicapai apabila secara konsisten pencapaian meningkat dari tahun ke tahun.

Khusus untuk Nilai Indeks Inovasi Daerah, karena indikator kinerja ini baru muncul di perubahan IKU dan PK Tahun 2023, maka target untuk 2024, 2025 dan 2026 belum ditetapkan. Untuk itu target-target di atas secara keseluruhan perlu ditinjau ulang dan dimuat dalam revisi Renstra Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Standar nasional realisasi kinerja untuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar belum ada, maka belum dapat dilakukan proses pembandingannya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target kinerja Bappenas sebagaimana yang tertuang pada Renstra Bappenas ada kesamaan beberapa indikator sebagaimana disandingkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar dengan Beppenas

BAPPENAS			BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR		
Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi
1.1 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	90	Belum dirilis	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan.	85 %	99,58%
1.2 Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	92,5%	Belum dirilis	Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah.	85 %	85,71%
2 Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	92-95,9%	Belum dirilis	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25	25,76
3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	94-96,9%	Belum dirilis			
3.2 Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	90-94,9%	Belum dirilis			
4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	90,50	Belum dirilis			

BAPPENAS			BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR		
Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi
4.2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	92	Belum dirilis			
4.3 Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	92%	Belum dirilis			

Sumber : Renstra Bappenas 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar dengan Indikator Kinerja Bappenas yang memiliki kesamaan adalah yang diarsir dengan warna yang sama (ada sejumlah tiga indicator Bappeda). Untuk tahun 2023 Bappenas belum merilis realisasi kinerja, akan tetapi secara historis dari 2020 sampai 2022 realisasi kinerja Bappenas selalu tercapai melebihi target tahunan bahkan melebihi target akhir Renstra. Dengan asumsi bahwa pada Tahun 2023 juga realisasi kinerja Bappenas tercapai melebihi target tahunan, maka jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Bappeda Pematangsiantar dapat dikatakan bahwa pencapaian Bappeda Kota Pematangsiantar sudah baik, karena juga berhasil melebihi target tahunan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan target akhir renstra masih berada dibawah target akhir renstra.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2023 Bappeda telah berhasil mencapai target kinerja secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan maupun perjanjian kinerja. Beberapa faktor penyebab keberhasilan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan di Kota Pematangsiantar.

Hal tersebut didukung dengan ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai semua program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan sangat dibutuhkan, karena tidak mungkin kegiatan bisa terlaksana apabila tidak ada anggarannya. Walaupun anggaran Bappeda tidak terlalu besar tetapi berkat perencanaan yang baik, semuanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas pada Tahun 2023. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- Ketepatan dalam perencanaan program dan kegiatan;
 - Kesesuaian pengalokasian anggaran dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Kualitas Sumber Daya Manusi telah meningkat.
- Adanya sinergi antar bidang di Bappeda yang secara umum didukung oleh Sumber Daya Manusia yang sudah mumpuni, dengan adanya pejabat struktural yang sudah berpengalaman dan mempunyai pendidikan yang tinggi, demikian juga adanya pejabat fungsional penyetaraan yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam perencanaan, serta ditambah lagi sudah banyak pejabat fungsional perencana hasil uji kompetensi sehingga pejabat fungsional perencana di Bappeda Kota Pematangsiantar telah sesuai standar nasional juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran kinerja. Disamping itu pola kerja dengan berdasarkan tim kerja sesuai dengan squad tim yang diatur oleh Menpan RB sangat efektif untuk meningkatkan kerja sama tim diantara para pegawai Bappeda.

3. Sarana dan Prasarana yang memadai

Tersedia sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan pegawai Bappeda, dan ini akan terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan ke depan dalam rangka pencapaian kinerja secara optimal antara lain:

- a. Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- b. Koordinasi dan komunikasi baik diinternal maupun antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah lain dalam mewujudkan keselarasan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan serta pengendalian perencanaan pembangunan.
- c. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung inovasi dan kreativitas SDM serta mendukung penyelenggaraan sistem kerja IDW-SO kedepan.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2023 Bappeda Kota Pematangsiantar melaksanakan 4 Program dan 14 Kegiatan serta 29 sub kegiatan, secara keseluruhan realisasi program/kegiatan dapat menghasilkan realisasi kinerja dengan capaian 107,01 % dengan rata dengan realisasi keuangan sebesar 95,08 %. Pada dasarnya program/kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. Berdasarkan capaian tersebut dapat dihitung tingkat efisiensi, dimana efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja yang dapat dilihat pada rumus perhitungan berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \text{ Rata-rata Capaian Kinerja}}{\% \text{ Rata-rata Capaian Penyerapan Anggaran}}$$

Kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan adalah (1) Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu (≥ 1), maka terjadi efisiensi; dan (2) Jika nilai efisiensi lebih kecil dari satu (<1), maka efisiensi tidak tercapai. Dengan demikian, hasil analisis efisiensi anggaran Bappeda Kota Pematangsiantar untuk Tahun 2023 adalah :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{107,01\%}{95,08} = 1,12$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Bappeda Kota Pematangsiantar terhadap capaian realisasi anggaran sebesar ≥ 1 , artinya terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

Dapat dikatakan bahwa capaian realisasi keuangan tidak sepenuhnya terserap dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran	SISA	Rincian Masalah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD)	90%	100%	111,11	795.384.833	728.178.203	91,55	67.206.630	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	100%	100%	100	619.606.517	557.573.105	89,99	62.033.412	
1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita acara	1 Berita acara	100	143.760.175	124.470.090	86,58	19.290.085	
2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100	475.846.342	433.103.015	91,02	42.743.327	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	100%	100%	100	31.089.585	30.098.523	96,81	991.062	
3	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen	100	31.089.585	30.098.523	96,81	991.062	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	100%	100%	100	144.688.731	140.506.575	97,11	4.182.156	
4	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan	9 Laporan	100	144.688.731	140.506.575	97,11	4.182.156	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang	90%	100%	111,11	551.171.433	500.548.356	90,82	50.623.077	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran	SISA	Rincian Masalah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	PEMBANGUNAN DAERAH	pemerintahan dan pembangunan manusia								
4	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Rumusan	8 Rumusan	100	187.102.406	181.525.813	97,02	5.576.593	
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	99.191.056	97.744.238	98,54	1.446.818	
6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	87.911.350	83.781.575	95,30	4.129.775	
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA	8 Rumusan	8 Rumusan	100	113.255.947	101.668.684	89,77	11.587.263	
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	75.711.666	65.277.695	86,22	10.433.971	
8	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	37.544.281	36.390.989	96,93	1.153.292	
6	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Rumusan	8 Rumusan	100	250.813.080	217.353.859	86,66	33.459.221	
9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	66.981.861	63.808.587	95,26	3.173.274	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran	SISA	Rincian Masalah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	58.215.276	56.459.215	96,98	1.756.061	
11	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100	125.615.943	97.086.057	77,29	28.529.886	
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	85%	100%	117,64	1.206.482.731	1.013.480.773	84,00	193.001.958	
7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Kajian	2 Kajian	0	1.150.000.000	957.252.000	83,24	192.748.000	
12	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Kajian	1 Dokumen	100	550.000.000	505.426.500	91,90	44.573.500	
13	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Kajian	1 Dokumen	100	600.000.000	451.825.500	75,30	148.174.500	
8	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	1 Inovasi	1 Inovasi	100	56.482.731	56.228.773	99,55	253.958	
14	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Inovasi	1 Inovasi	100	56.482.731	56.228.773	99,55	253.958	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B Indeks (>60-70)	CC Indeks (54,70)	89,67	5.617.403.599	5.525.931.820	98,37	91.471.779	
9	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	100	22.136.455	21.759.770	98,30	376.685	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran	SISA	Rincian Masalah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	100	22.136.455	21.759.770	98,30	376.685	
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitras Keuangan	50 Orang	50 Orang	100	3.958.166.461	3.931.298.793	99,32	26.867.668	
16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	50 Orang	100	3.958.166.461	3.931.298.793	99,32	26.867.668	
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	100	462.298.460	436.251.183	94,37	6.047.277	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	8.933.750	7.957.628	89,07	976.122	
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	25 paket	100	48.184.017	45.641.925	94,72	2.542.092	
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	14 paket	93,33	14.536.820	14.132.970	97,22	403.850	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400 paket	400 Paket	100	49.150.000	45.300.000	92,17	3.850.000	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,00 Paket	100	33.441.473	32.710.510	97,81	730.963	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan	102,00 Laporan	100	308.052.400	290.508.150	94,30	17.544.250	
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	381.621.823	359.899.503	94,31	21.722.320	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 laporan	100	82.171.823	67.571.503	82,23	14.600.320	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100	299.450.000	292.328.000	97,62	7.122.000	
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100	477.247.400	465.469.000	97,53	11.778.400	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran	SISA	Rincian Masalah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	47.500.000	37.504.000	78,96	9.996.000	
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	100	429.747.400	427.965.000	99,59	1.782.400	
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	58,68	315.933.000	311.253.571	98,52	4.679.429	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100	40.870.000	39.735.773	97,22	1.134.227	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	100	25.260.000	23.060.000	91,29	2.200.000	
29	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 paket	100	249.803.000	248.457.798	99,46	1.345.202	
						8.170.442.596	7.768.139.152	95,08	402.303.444	

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut analisis Program/Kegiatan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.

a. Sasaran pertama yaitu “Keselarasan perencanaan pembangunan daerah” yang diukur dengan indikator kinerja “Persentase keselarasan perencanaan pembangunan”.

Sasaran ini menggambarkan tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan yang ada (RPJMD dengan Renstra, RKPD dengan Renja) serta keselarasan antar dokumen perencanaan pemerintah (pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota dengan pemerintah pusat). Semakin tinggi persentase keselarasan perencanaan pembangunan, maka akan semakin baik kualitas dokumen perencanaan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan teknis penilaian kualitas dokumen perencanaan yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk capaian Tahun 2023, kinerja pada sasaran ini ditargetkan 85 % dan terealisasi 99,58 % dengan capaian 117,15 %. Kinerja ini didukung melalui PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN, dengan Anggaran Rp. 795.384.833 dengan realisasi anggaran Rp. 728.178.203 dengan kata lain capaian kinerja anggaran mencapai 91,55 %. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator persentase keselarasan perencanaan pembangunan adalah adanya komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah dan diikuti oleh seluruh pejabat terkait dalam meningkatkan kualitas Dokumen RKPD 2023 sehingga selaras antara perencanaan dan penganggaran.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator ini pada tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kompetensi para ASN di Bappeda khususnya para pejabat fungsional perencana.
2. Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para perangkat daerah dan pemerintah atasan terkait sinkronisasi dan sinergitas perencanaan.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada.

b. Sasaran kedua yaitu “Efektivitas pengendalian pembangunan daerah” yang diukur dengan indikator kinerja “Persentase capaian pembangunan daerah”.

Sasaran ini menggambarkan keberhasilan fungsi Bappeda dalam merealisasikan capaian pembangunan daerah, khususnya yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Melalui pengendalian pembangunan yang dilakukan secara berkala, diharapkan capaian pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai rencana atau bahkan jika memungkinkan lebih cepat. Semakin tinggi persentase capaian pembangunan yang tercapai, maka fungsi pengendalian pembangunan dinilai semakin berhasil. Capaian pembangunan merupakan dasar dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Untuk Tahun 2023, dari target 85 % terealisasi sebesar 85,71 % dengan capaian 100,83 %. Kinerja ini didukung melalui PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH dengan Anggaran Rp. 551.171.433 dan realisasi anggaran Rp 500.548.356 dengan kata lain capaian kinerja keuangan mencapai 90,82 %. Faktor-faktor keberhasilan capaian indikator persentase capaian pembangunan daerah daerah diantaranya adalah :

1. Meningkatnya koordinasi dan kesadaran di lingkungan Perangkat Daerah terkait evaluasi kinerja.
2. Evaluasi kinerja telah dijadikan salah satu komponen dalam pemberian reward dan punishment.

Untuk mengatasi permasalahan di atas pada masa yang akan datang, akan dilakukan beberapa hal, yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah terkait dokumen perencanaan yang berlaku.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pusat Statistik.
- 3) Meningkatkan pengendalian capaian pembangunan melalui desk setiap triwulan.
- 4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

c. Sasaran ketiga yaitu “Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan” yang diukur dengan indikator kinerja “Nilai Indeks Inovasi Daerah”.

Sasaran ini merupakan gambaran dari fungsi penelitian dan pengembangan yang melekat pada Bappeda Kota Pematang Siantar. Melalui capaian indikator kinerja pada sasaran ini diharapkan bahwa Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar mendorong semua Perangkat Daerah untuk menghasilkan minimal 1 inovasi setiap tahunnya sehingga nilai Indeks Inovasi Daerah meningkat. Semakin tinggi nilai indeks inovasi, tentunya menggambarkan semakin banyak inovasi yang dihasilkan dalam pelayanan masyarakat maupun dalam kemudahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Untuk tahun 2023, dari target 25 terealisasi 25,76 dengan capaian 103,04%. Kinerja ini didukung melalui PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH dengan Anggaran sebesar Rp. 1.206.482.731 dengan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 1.013.480.773 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 84,00%.

Kalau melihat dari target dan realisasi, capaian kinerja nilai indeks inovasi daerah sudah termasuk kriteria sangat tinggi. Akan tetapi target dan realisasi tersebut sebenarnya masih menggambarkan bahwa Kota Pematangsiantar masih kurang inovatif. Kedepan Bappeda Kota Pematangsiantar harus menetapkan target yang lebih tinggi sehingga Kota Pematangsiantar menjadi kota yang inovatif. Adapun faktor penghambat dalam peningkatan target kinerja sasaran ini adalah:

- a. Banyak inovasi yang digagas oleh perangkat daerah tidak berkelanjutan sehingga tidak bisa diikuti dalam penilaian, karena syarat inovasi minimal 2 tahun.
- b. Inovasi yang digagas walaupun mempunyai keterkaitan antar OPD, masih belum terintegrasi sehingga nilainya rendah.

Untuk mengatasi permasalahan di atas pada masa yang akan datang, akan dilakukan beberapa hal, yaitu :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang dalam mengelola suatu inovasi.
- 2) Melibatkan instansi yang berwenang dalam pembuatan inovasi.
- 3) Menelaah kembali inovasi yang telah disusun namun tidak berjalan dengan semestinya.
- 4) Mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah.

4. Sasaran keempat yaitu “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah” yang diukur dengan indikator kinerja “Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat”.

Pada perjanjian kinerja tahun 2023 sasaran ini memang tidak dicantumkan, akan tetapi sasaran ini merupakan sasaran pendukung dalam pencapaian sasaran kinerja strategis Bappeda sebagaimana tercantum pada Renstra Perangkat Daerah 2022-2027. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan menjadi penting dalam pencapaian sasaran strategis Bappeda karena jika tata kelola dan pelayanan administrasi tidak baik, maka dapat berpengaruh pada pencapaian sasaran strategis. Semakin tinggi capaian nilai AKIP perangkat daerah, maka semakin baik tata kelola penyelenggaraan urusan di Bappeda.

Untuk tahun 2023, target nilai AKIP Bappeda adalah B terealisasi CC dengan capaian 89,67%. Kinerja ini didukung melalui PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA dengan realisasi anggaran mencapai Rp.5.617.403.599 dan realisasi sebesar Rp 5.525.931.820, dengan kata lain capaian kinerja keuangan mencapai 98,37%.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja sasaran ini adalah:

1) Kurangnya sosialisasi terkait penerapan SAKIP pada lingkungan internal Bappeda.

Untuk mengatasi permasalahan di atas pada masa yang akan datang, akan dilakukan beberapa hal, yaitu :

1) Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kompetensi ASN Bappeda terkait penerapan SAKIP dan pengendalian internal.

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana disebutkan diatas dapat disajikan secara rinci pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sd 2023	Realisasi Sampai 2023	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Keselarasn Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasn perencanaan pembangunan	85 %	99,58%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	795.384.833	728.178.203	91,55
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	619.606.517	557.573.105	89,99
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	31.089.585	30.098.523	96,81
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	144.688.731	140.506.575	97,11
2	Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian Pembangunan daerah	85 %	85,71%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	551.171.433	500.548.356	90,82
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	187.102.406	181.525.813	97,02
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	113.255.947	101.668.684	89,77
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	250.813.080	217.353.859	86,66
3	Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan ngunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25	25,76	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.206.482.731	1.013.480.773	84,00
					Penelitian dan Pengembang-an Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.150.000.000	957.252.000	83,24

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sd 2023	Realisasi Sampai 2023	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	56.482.731	56.228.773	99,55
4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B (>60-70)	CC (54,70)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	5.617.403.599	5.525.931.820	98,37
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.136.455	21.759.770	98,30
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.958.166.461	3.931.298.793	99,32
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.298.460	436.251.183	94,37
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.621.823	359.899.503	94,31
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	477.247.400	465.469.000	97,53
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.933.000	311.253.571	98,52
Jumlah						8.170.442.596	7.768.139.152	95,08

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 7.768.139.152 atau dengan nilai persentase realisasi keuangan sebesar 95,08% dengan rincian realisasi Belanja Operasional adalah sebesar Rp 7.069.141.854 dengan presentase realisasi keuangan 94,78 % dan realisasi Belanja Modal Rp 698.997.298 dengan presentase sebesar 98,17%. Jika dilihat dari realisasi anggaran setiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran ke-4 yaitu Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah Rp 5.525.931.820 dengan presentase 98,37% dari realisasi belanja. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	8.170.442.596	7.768.139.152	95,08	6.703.991.024
5.1	BELANJA OPERASI	7.458.392.196	7.069.141.854	94,78	6.537.606.024
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.458.392.196	7.069.141.854	94,78	6.537.606.024
5.2	BELANJA MODAL	712.050.400	698.997.298	98,17	166.385.000
	JUMLAH BELANJA MODAL	712.050.400	698.997.298	98,17	166.385.000
	JUMLAH BELANJA	8.170.442.596	7.768.139.152	95,08	6.703.991.024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Selanjutnya realisasi anggaran untuk Sekretariat dan Bidang dapat dirinci per program dan kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Untuk Sekretariat dan Bidang Per Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	6	7	8	9
1	Sekretariat		5.617.403.599	5.525.931.820	98,37
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	5.617.403.599	5.525.931.820	98,37
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.136.455	21.759.770	98,30
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.958.166.461	3.931.298.793	99,32
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.298.460	436.251.183	94,37
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.621.823	359.899.503	94,31
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	477.247.400	465.469.000	97,53
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.933.000	311.253.571	98,52
2	Bidang Perencanaan Ekonomi		732.862.464	659.241.789	89,95
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	113.255.947	101.668.684	89,77
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	113.255.947	101.668.684	89,77
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	619.606.517	557.573.105	89,99
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	619.606.517	557.573.105	89,99
3	Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya		187.102.406	181.525.813	97,02
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	187.102.406	181.525.813	97,02
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	187.102.406	181.525.813	97,02
4	Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana		1.400.813.080	1.174.605.859	83,85
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	250.813.080	217.353.859	86,66
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	250.813.080	217.353.859	86,66
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.150.000.000	957.252.000	83,24
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.150.000.000	957.252.000	83,24
5	Bidang Penelitian Pengembangan, Riset dan Inovasi		320.467.047	311.111.673	97,08
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	175.778.316	170.605.098	97,057
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	31.089.585	30.098.523	96,81

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	6	7	8	9
		Perencanaan Pembangunan Daerah			
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	144.688.731	140.506.575	97,11
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	56.482.731	56.228.773	99,55
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	56.482.731	56.228.773	99,55
Jumlah			8.170.442.596	7.768.139.152	95,08

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran per Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggara(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keselarasn Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasn perencanaan pembangunan	85 %	99,58%	795.384.833	728.178.203	91,55
2	Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian Pembangunan daerah	85 %	85,71%	551.171.433	500.548.356	90,82
3	Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan ngunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25	25,76	1.206.482.731	1.013.480.773	84,00
4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	B	5.617.403.599	5.525.931.820	98,37
Jumlah					8.170.442.596	7.768.139.152	95,08

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja yang sangat baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.

4.1. Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Tahun 2022-2027 dan telah memenuhi sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan pada tahun berikutnya. Kekurangan yang ada di Tahun

2023 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna bahan penyusunan perubahan Rencana Strategis lima tahun berjalan sehingga kinerja lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

4.2. Kendala Dan Hambatan Pencapaian Kinerja

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar produk akhir Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan akumulasi proses yang memerlukan pelibatan pihak luar (OPD dan Stakeholder lain dalam manajemen pembangunan), dimana hal tersebut sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Seringkali hal tersebut menjadi penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan.
2. Bidang Riset dan Inovasi Bappeda Kota Pematangsiantar terus berupaya untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi dikala masih kurang lengkapnya database tingkat kota dan masih kurangnya inovasi yang muncul dari Perangkat Daerah.
3. Perangkat regulasi dari Pemerintah Pusat yang belum lengkap dimana dengan adanya kebijakan tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah daerah menggunakan satu sistem perencanaan dan penganggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat, hal ini mengandung konsekuensi bagi Bappeda Kota Pematangsiantar untuk melakukan integrasi sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang telah digunakan oleh Bappeda saat ini dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Masih diperlukan banyak penyempurnaan fitur SIPD untuk mempermudah sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pada Bappeda Kota Pematangsiantar;
2. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan.
3. Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif antara Bappeda dan Perangkat Daerah dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan program agar target pencapaian sasaran dapat tercapai.
4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi internal, dengan menyandingkan antara capaian sasaran kinerja secara berjenjang agar terlihat adanya korelasi yang jelas terkait capaian sasaran strategis perangkat daerah dengan capaian kinerja program, capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan dan capaian kinerja staf.
5. Penyusunan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan lebih cermat untuk pencapaian target indikator kinerja dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
6. Melakukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
7. Optimalisasi mekanisme manajemen internal Bappeda Kota Pematangsiantar untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
8. Melengkapi database kelitbangan tingkat kota, dan terus mendorong inovasi yang muncul dari Perangkat Daerah.
9. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan mekanisme.

10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar khususnya di Bappeda Kota Pematangsiantar, dan dijadikan sebagai pertimbangan atau bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Demikian LAKIP Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2023, semoga dapat memberikan informasi maupun parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,

DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19811130 200312 1 003

LAMPIRAN

1. Eviden Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan.
2. Eviden Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah.
3. Eviden Nilai Indeks Inovasi Daerah
4. Perjanjian Kinerja Kepala Badan, Skeretaris dan Kepala Bidang
5. Perjanjian Kinerja Masing-masing Jabatan

Peresentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	Keselarasan sasaran RKPd terhadap RPJMD	$12/12 \times 100\% = 100\%$
	Keselarasan Indikator Sasaran RKPd Terhadap RPJMD	$18/18 \times 100\% = 100\%$
	Keselarasan target sasaran RKPd terhadap RPJMD	$18/18 \times 100\% = 100\%$
	Keselarasan Program RKPd terhadap RPJMD	$196/201 \times 100\% = 98\%$
	Keselarasan Indikator Program RKPd terhadap RPJMD	$258/258 \times 100\% = 100\%$
	Keselarasan Target Program RKPd terhadap RPJMD	$258/258 \times 100\% = 100\%$

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA,


DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19811130 200312 1 003

**KERTAS KERJA
PERSENTASE CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Capaian Kinerja	Indikator	Satuan	Target IKU	Capaian IKU	Keterangan
1	Jumlah Indikator Kinerja Utama Daerah yang tercapai dibagi jumlah Indikator Kinerja Utama Daerahx100 %	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,70-80.13	80,46	Tercapai
		Persentase tingkat kemiskinan	%	7,88-7,63	7,24	Tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,36-9,11	8,62	Tercapai
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,47-3,72	3,47	Tercapai
		Indesk Gini	Indeks	0,321-0,305	0,329	Tercapai
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C (45-50)	CC (54,82)	Tercapai
		Indeks Infrastruktur	Indeks	0,88	0,82*	Tidak Tercapai

Jumlah Indikator Kinerja Utama Daerah yang tercapai

6

Jumlah Indikator Kinerja Utama Daerah

7

Capaian Kinerja

85,71%

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KEPALA



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19811130 200312 1003



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11-6287 TAHUN 2023

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2023

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
- Memperhatikan :
1. Revisi ke-10 (kesepuluh) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-010.11.1.403222/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
 2. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 Nomor 000.10/4885/BSKDN tanggal 14 September 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2023.
- KESATU : Melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
- KEDUA : Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

- KETIGA : Menetapkan Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2023

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 400.10.11-6287 TAHUN 2023
 TENTANG
 INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,
 KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2023

INDEKS INOVASI DAERAH
 PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2023

A. Kategori Provinsi

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 9 Provinsi
 2) Inovatif : 19 Provinsi
 3) Kurang Inovatif : 9 Provinsi
 4) Tidak Dapat Dinilai (*Disclaimer*) : 1 Provinsi

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Provinsi Sumatera Selatan	83,28	Sangat Inovatif
2	Provinsi DKI Jakarta	80,98	Sangat Inovatif
3	Provinsi Nusa Tenggara Barat	75,37	Sangat Inovatif
4	Provinsi Jawa Barat	74,77	Sangat Inovatif
5	Provinsi Sumatera Barat	71,99	Sangat Inovatif
6	Provinsi Jawa Timur	71,38	Sangat Inovatif
7	Provinsi Bali	67,44	Sangat Inovatif
8	Provinsi Jawa Tengah	65,40	Sangat Inovatif
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	62,53	Sangat Inovatif
10	Provinsi Lampung	58,70	Inovatif
11	Provinsi Banten	56,92	Inovatif
12	Provinsi Maluku Utara	56,75	Inovatif
13	Provinsi Aceh	55,38	Inovatif
14	Provinsi Sumatera Utara	53,76	Inovatif
15	Provinsi Riau	53,52	Inovatif
16	Provinsi Sulawesi Selatan	53,09	Inovatif
17	Provinsi Bengkulu	51,49	Inovatif
18	Provinsi DI Yogyakarta	49,84	Inovatif
19	Provinsi Kalimantan Timur	49,23	Inovatif
20	Provinsi Kalimantan Selatan	47,50	Inovatif
21	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	47,50	Inovatif
22	Provinsi Maluku	47,34	Inovatif
23	Provinsi Kalimantan Utara	45,86	Inovatif
24	Provinsi Gorontalo	44,63	Inovatif
25	Provinsi Sulawesi Utara	43,90	Inovatif
26	Provinsi Kepulauan Riau	43,83	Inovatif
27	Provinsi Kalimantan Barat	43,73	Inovatif
28	Provinsi Jambi	37,91	Inovatif
29	Provinsi Sulawesi Tengah	34,00	Kurang Inovatif
30	Provinsi Sulawesi Tenggara	32,85	Kurang Inovatif
31	Provinsi Papua Barat	30,23	Kurang Inovatif
32	Provinsi Sulawesi Barat	29,04	Kurang Inovatif
33	Provinsi Kalimantan Tengah	25,70	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
34	Provinsi Papua	24,94	Kurang Inovatif
35	Provinsi Papua Tengah	3,60	Kurang Inovatif
36	Provinsi Papua Selatan	1,20	Kurang Inovatif
37	Provinsi Papua Pegunungan	1,20	Kurang Inovatif
38	Provinsi Papua Barat Daya	0,00	Tidak Dapat Dinilai

B. Kategori Kabupaten

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 41 Kabupaten
- 2) Inovatif : 252 Kabupaten
- 3) Kurang Inovatif : 104 Kabupaten
- 4) Tidak Dapat Dinilai (*Disclaimer*) : 18 Kabupaten

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kabupaten Wonogiri	91,72	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Situbondo	87,11	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Banyuwangi	86,94	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Bangka	84,98	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Sragen	84,57	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Pamekasan	83,63	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Padang Pariaman	83,34	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Tabalong	82,69	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Bogor	80,93	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Temanggung	80,87	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Boyolali	78,51	Sangat Inovatif
12	Kabupaten Blora	74,90	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Mesuji	72,43	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	70,41	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Klaten	69,65	Sangat Inovatif
16	Kabupaten Sampang	68,09	Sangat Inovatif
17	Kabupaten Bantul	65,50	Sangat Inovatif
18	Kabupaten Pesawaran	65,13	Sangat Inovatif
19	Kabupaten Bondowoso	65,05	Sangat Inovatif
20	Kabupaten Balangan	63,95	Sangat Inovatif
21	Kabupaten Grobogan	63,85	Sangat Inovatif
22	Kabupaten Indragiri Hilir	63,72	Sangat Inovatif
23	Kabupaten Ngawi	63,18	Sangat Inovatif
24	Kabupaten Trenggalek	62,76	Sangat Inovatif
25	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	62,48	Sangat Inovatif
26	Kabupaten Aceh Jaya	62,31	Sangat Inovatif
27	Kabupaten Sidoarjo	62,08	Sangat Inovatif
28	Kabupaten Lampung Selatan	62,06	Sangat Inovatif
29	Kabupaten Pringsewu	61,54	Sangat Inovatif
30	Kabupaten Tangerang	61,49	Sangat Inovatif
31	Kabupaten Lampung Barat	61,46	Sangat Inovatif
32	Kabupaten Blitar	61,42	Sangat Inovatif
33	Kabupaten Ogan Ilir	61,16	Sangat Inovatif
34	Kabupaten Tulangbawang	61,08	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
35	Kabupaten Tanggamus	60,94	Sangat Inovatif
36	Kabupaten Klungkung	60,77	Sangat Inovatif
37	Kabupaten Malang	60,58	Sangat Inovatif
38	Kabupaten Hulu Sungai Utara	60,48	Sangat Inovatif
39	Kabupaten Pati	60,40	Sangat Inovatif
40	Kabupaten Tegal	60,33	Sangat Inovatif
41	Kabupaten Sumedang	60,06	Sangat Inovatif
42	Kabupaten Bangka Tengah	59,39	Inovatif
43	Kabupaten Deli Serdang	59,10	Inovatif
44	Kabupaten Kutai Kartanegara	58,69	Inovatif
45	Kabupaten Bintan	58,66	Inovatif
46	Kabupaten Kulon Progo	58,44	Inovatif
47	Kabupaten Pesisir Selatan	58,34	Inovatif
48	Kabupaten Rembang	58,32	Inovatif
49	Kabupaten Pelalawan	58,21	Inovatif
50	Kabupaten Lampung Utara	58,12	Inovatif
51	Kabupaten Jember	57,97	Inovatif
52	Kabupaten Magelang	57,83	Inovatif
53	Kabupaten Banjar	57,64	Inovatif
54	Kabupaten Sleman	57,23	Inovatif
55	Kabupaten Cilacap	56,93	Inovatif
56	Kabupaten Lombok Utara	56,92	Inovatif
57	Kabupaten Lamongan	56,55	Inovatif
58	Kabupaten Sukoharjo	56,48	Inovatif
59	Kabupaten Sumbawa Barat	56,15	Inovatif
60	Kabupaten Dompu	56,03	Inovatif
61	Kabupaten Karo	55,96	Inovatif
62	Kabupaten Sambas	55,87	Inovatif
63	Kabupaten Musi Rawas	55,75	Inovatif
64	Kabupaten Muara Enim	55,71	Inovatif
65	Kabupaten Dharmas Raya	55,61	Inovatif
66	Kabupaten Kudus	55,57	Inovatif
67	Kabupaten Ogan Komering Ilir	55,56	Inovatif
68	Kabupaten Subang	55,48	Inovatif
69	Kabupaten Luwu Timur	55,29	Inovatif
70	Kabupaten Tanah Laut	55,14	Inovatif
71	Kabupaten Pasaman Barat	55,03	Inovatif
72	Kabupaten Pasuruan	54,99	Inovatif
73	Kabupaten Banyumas	54,92	Inovatif
74	Kabupaten Karang Asem	54,79	Inovatif
75	Kabupaten Gunung Kidul	54,67	Inovatif
76	Kabupaten Lumajang	54,60	Inovatif
77	Kabupaten Mamuju Tengah	54,50	Inovatif
78	Kabupaten Buleleng	54,30	Inovatif
79	Kabupaten Pasaman	54,14	Inovatif
80	Kabupaten Sumba Timur	53,97	Inovatif
81	Kabupaten Sanggau	53,94	Inovatif
82	Kabupaten Belitang Timur	53,69	Inovatif
83	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	53,66	Inovatif
84	Kabupaten Halmahera Selatan	53,57	Inovatif
85	Kabupaten Barito Selatan	53,36	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
86	Kabupaten Way Kanan	53,35	Inovatif
87	Kabupaten Batu Bara	53,17	Inovatif
88	Kabupaten Sijunjung	53,15	Inovatif
89	Kabupaten Solok Selatan	53,02	Inovatif
90	Kabupaten Aceh Barat	52,95	Inovatif
91	Kabupaten Tapin	52,94	Inovatif
92	Kabupaten Pekalongan	52,86	Inovatif
93	Kabupaten Jombang	52,69	Inovatif
94	Kabupaten Karanganyar	52,59	Inovatif
95	Kabupaten Ciamis	52,49	Inovatif
96	Kabupaten Humbang Hasundutan	52,22	Inovatif
97	Kabupaten Kendal	52,18	Inovatif
98	Kabupaten Bangkalan	52,03	Inovatif
99	Kabupaten Wonosobo	51,82	Inovatif
100	Kabupaten Mojokerto	51,74	Inovatif
101	Kabupaten Aceh Tamiang	51,72	Inovatif
102	Kabupaten Banyu Asin	51,71	Inovatif
103	Kabupaten Bekasi	51,64	Inovatif
104	Kabupaten Brebes	51,60	Inovatif
105	Kabupaten Bandung	51,52	Inovatif
106	Kabupaten Majalengka	51,48	Inovatif
107	Kabupaten Bengkulu Selatan	51,45	Inovatif
108	Kabupaten Labuhanbatu	51,34	Inovatif
109	Kabupaten Semarang	51,26	Inovatif
110	Kabupaten Kotawaringin Timur	51,15	Inovatif
111	Kabupaten Kaimana	50,98	Inovatif
112	Kabupaten Badung	50,96	Inovatif
113	Kabupaten Madiun	50,94	Inovatif
114	Kabupaten Lombok Barat	50,72	Inovatif
115	Kabupaten Gorontalo	50,68	Inovatif
116	Kabupaten Banggai	50,65	Inovatif
117	Kabupaten Kampar	50,62	Inovatif
118	Kabupaten Maluku Tengah	50,10	Inovatif
119	Kabupaten Takalar	49,96	Inovatif
120	Kabupaten Bangli	49,96	Inovatif
121	Kabupaten Tapanuli Utara	49,79	Inovatif
122	Kabupaten Nganjuk	49,76	Inovatif
123	Kabupaten Bojonegoro	49,75	Inovatif
124	Kabupaten Empat Lawang	49,57	Inovatif
125	Kabupaten Kerinci	49,53	Inovatif
126	Kabupaten Serdang Bedagai	49,50	Inovatif
127	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	49,43	Inovatif
128	Kabupaten Lingga	49,43	Inovatif
129	Kabupaten Kebumen	49,28	Inovatif
130	Kabupaten Belu	49,28	Inovatif
131	Kabupaten Kubu Raya	49,23	Inovatif
132	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	49,17	Inovatif
133	Kabupaten Kepulauan Meranti	48,97	Inovatif
134	Kabupaten Samosir	48,88	Inovatif
135	Kabupaten Halmahera Tengah	48,86	Inovatif
136	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	48,80	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
137	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	48,76	Inovatif
138	Kabupaten Purworejo	48,76	Inovatif
139	Kabupaten Poso	48,73	Inovatif
140	Kabupaten Pohuwato	48,59	Inovatif
141	Kabupaten Asahan	48,58	Inovatif
142	Kabupaten Barru	48,50	Inovatif
143	Kabupaten Probolinggo	48,49	Inovatif
144	Kabupaten Karawang	48,44	Inovatif
145	Kabupaten Kaur	48,39	Inovatif
146	Kabupaten Bengkulu Utara	48,16	Inovatif
147	Kabupaten Kepahiang	48,15	Inovatif
148	Kabupaten Sekadau	48,09	Inovatif
149	Kabupaten Pakpak Bharat	48,08	Inovatif
150	Kabupaten Indramayu	48,02	Inovatif
151	Kabupaten Merauke	47,93	Inovatif
152	Kabupaten Sumbawa	47,92	Inovatif
153	Kabupaten Sumba Barat Daya	47,82	Inovatif
154	Kabupaten Bulukumba	47,77	Inovatif
155	Kabupaten Tebo	47,76	Inovatif
156	Kabupaten Kuantan Singingi	47,67	Inovatif
157	Kabupaten Sorong	47,63	Inovatif
158	Kabupaten Bulungan	47,55	Inovatif
159	Kabupaten Bantaeng	47,44	Inovatif
160	Kabupaten Tapanuli Selatan	47,42	Inovatif
161	Kabupaten Barito Utara	47,24	Inovatif
162	Kabupaten Cirebon	47,15	Inovatif
163	Kabupaten Buton	46,98	Inovatif
164	Kabupaten Nias Utara	46,96	Inovatif
165	Kabupaten Bireuen	46,81	Inovatif
166	Kabupaten Rokan Hulu	46,80	Inovatif
167	Kabupaten Karimun	46,76	Inovatif
168	Kabupaten Merangin	46,74	Inovatif
169	Kabupaten Pinrang	46,70	Inovatif
170	Kabupaten Tuban	46,70	Inovatif
171	Kabupaten Gianyar	46,65	Inovatif
172	Kabupaten Solok	46,56	Inovatif
173	Kabupaten Tanah Datar	46,44	Inovatif
174	Kabupaten Gayo Lues	46,35	Inovatif
175	Kabupaten Morowali	46,34	Inovatif
176	Kabupaten Luwu Utara	46,23	Inovatif
177	Kabupaten Seruyan	46,23	Inovatif
178	Kabupaten Pacitan	46,14	Inovatif
179	Kabupaten Kediri	46,06	Inovatif
180	Kabupaten Tana Tidung	46,00	Inovatif
181	Kabupaten Aceh Tengah	45,93	Inovatif
182	Kabupaten Lebong	45,92	Inovatif
183	Kabupaten Gresik	45,92	Inovatif
184	Kabupaten Tabanan	45,90	Inovatif
185	Kabupaten Mandailing Natal	45,80	Inovatif
186	Kabupaten Pidie	45,76	Inovatif
187	Kabupaten Bangka Selatan	45,67	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
188	Kabupaten Katingan	45,61	Inovatif
189	Kabupaten Pidie Jaya	45,58	Inovatif
190	Kabupaten Tojo Una-Una	45,46	Inovatif
191	Kabupaten Halmahera Timur	45,43	Inovatif
192	Kabupaten Konawe Kepulauan	45,30	Inovatif
193	Kabupaten Lebak	45,22	Inovatif
194	Kabupaten Sinjai	45,01	Inovatif
195	Kabupaten Boalemo	44,96	Inovatif
196	Kabupaten Luwu	44,95	Inovatif
197	Kabupaten Jepara	44,88	Inovatif
198	Kabupaten Lampung Tengah	44,80	Inovatif
199	Kabupaten Sukabumi	44,76	Inovatif
200	Kabupaten Purbalingga	44,61	Inovatif
201	Kabupaten Manggarai Barat	44,60	Inovatif
202	Kabupaten Ponorogo	44,52	Inovatif
203	Kabupaten Pesisir Barat	44,40	Inovatif
204	Kabupaten Cianjur	44,35	Inovatif
205	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	44,18	Inovatif
206	Kabupaten Indragiri Hulu	44,15	Inovatif
207	Kabupaten Ketapang	44,03	Inovatif
208	Kabupaten Pandeglang	43,87	Inovatif
209	Kabupaten Batang	43,76	Inovatif
210	Kabupaten Aceh Timur	43,66	Inovatif
211	Kabupaten Bone	43,58	Inovatif
212	Kabupaten Wajo	43,41	Inovatif
213	Kabupaten Soppeng	43,38	Inovatif
214	Kabupaten Sumenep	43,23	Inovatif
215	Kabupaten Belitung	43,22	Inovatif
216	Kabupaten Purwakarta	43,21	Inovatif
217	Kabupaten Malinau	43,18	Inovatif
218	Kabupaten Magetan	43,14	Inovatif
219	Kabupaten Jembrana	43,13	Inovatif
220	Kabupaten Tasikmalaya	43,12	Inovatif
221	Kabupaten Nias	43,09	Inovatif
222	Kabupaten Sumba Barat	43,05	Inovatif
223	Kabupaten Agam	43,03	Inovatif
224	Kabupaten Pangandaran	43,03	Inovatif
225	Kabupaten Selayar	43,02	Inovatif
226	Kabupaten Anambas	42,97	Inovatif
227	Kabupaten Garut	42,96	Inovatif
228	Kabupaten Banjarnegara	42,90	Inovatif
229	Kabupaten Serang	42,74	Inovatif
230	Kabupaten Seluma	42,73	Inovatif
231	Kabupaten Bengkulu	42,59	Inovatif
232	Kabupaten Musi Banyuasin	42,52	Inovatif
233	Kabupaten Tulungagung	42,26	Inovatif
234	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	42,04	Inovatif
235	Kabupaten Labuhanbatu Utara	42,02	Inovatif
236	Kabupaten Barito Kuala	42,01	Inovatif
237	Kabupaten Sikka	41,99	Inovatif
238	Kabupaten Flores Timur	41,98	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
239	Kabupaten Ngada	41,70	Inovatif
240	Kabupaten Polewali Mandar	41,64	Inovatif
241	Kabupaten Pulau Morotai	41,43	Inovatif
242	Kabupaten Parigi Moutong	41,38	Inovatif
243	Kabupaten Nias Barat	41,36	Inovatif
244	Kabupaten Paser	41,32	Inovatif
245	Kabupaten Simalungun	41,30	Inovatif
246	Kabupaten Tanah Bumbu	40,87	Inovatif
247	Kabupaten Banggai Laut	40,85	Inovatif
248	Kabupaten Maros	40,84	Inovatif
249	Kabupaten Rejang Lebong	40,69	Inovatif
250	Kabupaten Pematang	40,36	Inovatif
251	Kabupaten Padang Lawas Utara	40,19	Inovatif
252	Kabupaten Gowa	40,01	Inovatif
253	Kabupaten Berau	39,75	Inovatif
254	Kabupaten Kayong Utara	39,74	Inovatif
255	Kabupaten Majene	39,54	Inovatif
256	Kabupaten Rote Ndao	39,48	Inovatif
257	Kabupaten Bengkayang	39,40	Inovatif
258	Kabupaten Tulangbawang Barat	39,25	Inovatif
259	Kabupaten Halmahera Barat	39,18	Inovatif
260	Kabupaten Bandung Barat	39,07	Inovatif
261	Kabupaten Ogan Komering Ulu	38,76	Inovatif
262	Kabupaten Kolaka	38,33	Inovatif
263	Kabupaten Batanghari	38,06	Inovatif
264	Kabupaten Aceh Singkil	38,04	Inovatif
265	Kabupaten Sukamara	38,02	Inovatif
266	Kabupaten Lima Puluh Kota	37,84	Inovatif
267	Kabupaten Kotawaringin Barat	37,84	Inovatif
268	Kabupaten Lembata	37,70	Inovatif
269	Kabupaten Aceh Barat Daya	37,68	Inovatif
270	Kabupaten Sigi	37,65	Inovatif
271	Kabupaten Seram Bagian Timur	37,60	Inovatif
272	Kabupaten Timor Tengah Selatan	37,47	Inovatif
273	Kabupaten Mamasa	37,17	Inovatif
274	Kabupaten Siak	37,12	Inovatif
275	Kabupaten Natuna	37,10	Inovatif
276	Kabupaten Nias Selatan	37,08	Inovatif
277	Kabupaten Seram Bagian Barat	36,97	Inovatif
278	Kabupaten Musi Rawas Utara	36,93	Inovatif
279	Kabupaten Rokan Hilir	36,87	Inovatif
280	Kabupaten Aceh Utara	36,83	Inovatif
281	Kabupaten Simeulue	36,58	Inovatif
282	Kabupaten Manggarai	36,56	Inovatif
283	Kabupaten Konawe Selatan	36,38	Inovatif
284	Kabupaten Kuningan	36,30	Inovatif
285	Kabupaten Sintang	36,22	Inovatif
286	Kabupaten Buton Selatan	35,73	Inovatif
287	Kabupaten Nabire	35,65	Inovatif
288	Kabupaten Landak	35,55	Inovatif
289	Kabupaten Aceh Besar	35,41	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
290	Kabupaten Sabu Raijua	35,38	Inovatif
291	Kabupaten Demak	35,19	Inovatif
292	Kabupaten Morowali Utara	35,18	Inovatif
293	Kabupaten Kupang	35,08	Inovatif
294	Kabupaten Bangka Barat	34,77	Kurang Inovatif
295	Kabupaten Buru	34,54	Kurang Inovatif
296	Kabupaten Sidenreng Rappang	34,33	Kurang Inovatif
297	Kabupaten Bombana	34,26	Kurang Inovatif
298	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	34,20	Kurang Inovatif
299	Kabupaten Bengkulu Tengah	34,18	Kurang Inovatif
300	Kabupaten Nunukan	34,07	Kurang Inovatif
301	Kabupaten Lombok Tengah	33,09	Kurang Inovatif
302	Kabupaten Mukomuko	32,89	Kurang Inovatif
303	Kabupaten Gorontalo Utara	32,65	Kurang Inovatif
304	Kabupaten Nagan Raya	32,21	Kurang Inovatif
305	Kabupaten Paniai	32,14	Kurang Inovatif
306	Kabupaten Toli-Toli	32,11	Kurang Inovatif
307	Kabupaten Pulang Pisau	31,95	Kurang Inovatif
308	Kabupaten Lombok Timur	29,84	Kurang Inovatif
309	Kabupaten Bima	29,80	Kurang Inovatif
310	Kabupaten Bone Bolango	29,72	Kurang Inovatif
311	Kabupaten Muna	29,66	Kurang Inovatif
312	Kabupaten Minahasa Utara	29,60	Kurang Inovatif
313	Kabupaten Bolaang Mongondow	29,17	Kurang Inovatif
314	Kabupaten Minahasa Tenggara	29,06	Kurang Inovatif
315	Kabupaten Bener Meriah	28,82	Kurang Inovatif
316	Kabupaten Lampung Timur	27,62	Kurang Inovatif
317	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	26,30	Kurang Inovatif
318	Kabupaten Kolaka Utara	25,73	Kurang Inovatif
319	Kabupaten Lamandau	25,27	Kurang Inovatif
320	Kabupaten Timor Tengah Utara	25,13	Kurang Inovatif
321	Kabupaten Dairi	25,04	Kurang Inovatif
322	Kabupaten Aceh Selatan	24,74	Kurang Inovatif
323	Kabupaten Buton Tengah	24,64	Kurang Inovatif
324	Kabupaten Nagekeo	24,44	Kurang Inovatif
325	Kabupaten Gunung Mas	24,42	Kurang Inovatif
326	Kabupaten Konawe	24,34	Kurang Inovatif
327	Kabupaten Buton Utara	23,80	Kurang Inovatif
328	Kabupaten Kepulauan Sangihe	23,38	Kurang Inovatif
329	Kabupaten Muna Barat	22,48	Kurang Inovatif
330	Kabupaten Melawi	22,13	Kurang Inovatif
331	Kabupaten Kutai Barat	21,72	Kurang Inovatif
332	Kabupaten Sumba Tengah	21,54	Kurang Inovatif
333	Kabupaten Banggai Kepulauan	21,24	Kurang Inovatif
334	Kabupaten Mamuju	20,70	Kurang Inovatif
335	Kabupaten Lahat	20,66	Kurang Inovatif
336	Kabupaten Langkat	20,28	Kurang Inovatif
337	Kabupaten Ende	19,98	Kurang Inovatif
338	Kabupaten Kolaka Timur	19,38	Kurang Inovatif
339	Kabupaten Mempawah	18,98	Kurang Inovatif
340	Kabupaten Kapuas	18,42	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
341	Kabupaten Kepulauan Mentawai	18,31	Kurang Inovatif
342	Kabupaten Buol	17,94	Kurang Inovatif
343	Kabupaten Konawe Utara	17,94	Kurang Inovatif
344	Kabupaten Maluku Tenggara	17,72	Kurang Inovatif
345	Kabupaten Malaka	16,84	Kurang Inovatif
346	Kabupaten Barito Timur	16,52	Kurang Inovatif
347	Kabupaten Halmahera Utara	16,48	Kurang Inovatif
348	Kabupaten Penajam Paser Utara	15,96	Kurang Inovatif
349	Kabupaten Kota Baru	15,90	Kurang Inovatif
350	Kabupaten Padang Lawas	15,44	Kurang Inovatif
351	Kabupaten Tana Toraja	15,32	Kurang Inovatif
352	Kabupaten Bungo	15,30	Kurang Inovatif
353	Kabupaten Minahasa	14,70	Kurang Inovatif
354	Kabupaten Tapanuli Tengah	14,60	Kurang Inovatif
355	Kabupaten Jayapura	13,88	Kurang Inovatif
356	Kabupaten Sarolangun	13,70	Kurang Inovatif
357	Kabupaten Enrekang	13,60	Kurang Inovatif
358	Kabupaten Maluku Barat Daya	13,40	Kurang Inovatif
359	Kabupaten Buru Selatan	13,30	Kurang Inovatif
360	Kabupaten Toraja Utara	12,90	Kurang Inovatif
361	Kabupaten Jayawijaya	12,80	Kurang Inovatif
362	Kabupaten Teluk Bintuni	12,66	Kurang Inovatif
363	Kabupaten Jenepono	12,60	Kurang Inovatif
364	Kabupaten Aceh Tenggara	12,30	Kurang Inovatif
365	Kabupaten Kutai Timur	12,20	Kurang Inovatif
366	Kabupaten Keerom	11,80	Kurang Inovatif
367	Kabupaten Toba Samosir	11,76	Kurang Inovatif
368	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	11,60	Kurang Inovatif
369	Kabupaten Mamuju Utara	11,50	Kurang Inovatif
370	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	11,50	Kurang Inovatif
371	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	11,10	Kurang Inovatif
372	Kabupaten Alor	10,90	Kurang Inovatif
373	Kabupaten Teluk Wondama	10,80	Kurang Inovatif
374	Kabupaten Manokwari Selatan	10,50	Kurang Inovatif
375	Kabupaten Murung Raya	10,20	Kurang Inovatif
376	Kabupaten Kepulauan Aru	8,40	Kurang Inovatif
377	Kabupaten Mappi	8,20	Kurang Inovatif
378	Kabupaten Biak Numfor	7,80	Kurang Inovatif
379	Kabupaten Pulau Taliabu	7,70	Kurang Inovatif
380	Kabupaten Manggarai Timur	7,50	Kurang Inovatif
381	Kabupaten Wakatobi	7,30	Kurang Inovatif
382	Kabupaten Fakfak	7,10	Kurang Inovatif
383	Kabupaten Kepulauan Talaud	6,40	Kurang Inovatif
384	Kabupaten Mahakam Ulu	5,80	Kurang Inovatif
385	Kabupaten Kapuas Hulu	5,60	Kurang Inovatif
386	Kabupaten Donggala	5,10	Kurang Inovatif
387	Kabupaten Minahasa Selatan	3,00	Kurang Inovatif
388	Kabupaten Puncak Jaya	2,40	Kurang Inovatif
389	Kabupaten Raja Ampat	2,30	Kurang Inovatif
390	Kabupaten Sarmi	2,30	Kurang Inovatif
391	Kabupaten Mimika	2,10	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
392	Kabupaten Intan Jaya	1,80	Kurang Inovatif
393	Kabupaten Muaro Jambi	1,80	Kurang Inovatif
394	Kabupaten Dogiyai	1,40	Kurang Inovatif
395	Kabupaten Supiori	1,20	Kurang Inovatif
396	Kabupaten Kepulauan Sula	0,80	Kurang Inovatif
397	Kabupaten Deiyai	0,40	Kurang Inovatif
398	Kabupaten Mamberamo Raya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
399	Kabupaten Asmat	0,00	Tidak Dapat Dinilai
400	Kabupaten Tambrau	0,00	Tidak Dapat Dinilai
401	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	Tidak Dapat Dinilai
402	Kabupaten Yahukimo	0,00	Tidak Dapat Dinilai
403	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	Tidak Dapat Dinilai
404	Kabupaten Maybrat	0,00	Tidak Dapat Dinilai
405	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	Tidak Dapat Dinilai
406	Kabupaten Tolikara	0,00	Tidak Dapat Dinilai
407	Kabupaten Yalimo	0,00	Tidak Dapat Dinilai
408	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
409	Kabupaten Manokwari	0,00	Tidak Dapat Dinilai
410	Kabupaten Pegunungan Arfak	0,00	Tidak Dapat Dinilai
411	Kabupaten Nduga	0,00	Tidak Dapat Dinilai
412	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	Tidak Dapat Dinilai
413	Kabupaten Waropen	0,00	Tidak Dapat Dinilai
414	Kabupaten Puncak	0,00	Tidak Dapat Dinilai
415	Kabupaten Boven Digoel	0,00	Tidak Dapat Dinilai

C. Kategori Kota

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 25 Kota
- 2) Inovatif : 58 Kota
- 3) Kurang Inovatif : 10 Kota
- 4) Tidak Dapat Dinilai (*Disclaimer*) : 0 Kota

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kota Mojokerto	84,46	Sangat Inovatif
2	Kota Mataram	76,17	Sangat Inovatif
3	Kota Bekasi	72,74	Sangat Inovatif
4	Kota Cimahi	70,99	Sangat Inovatif
5	Kota Sawah Lunto	70,39	Sangat Inovatif
6	Kota Bandar Lampung	70,33	Sangat Inovatif
7	Kota Makassar	70,15	Sangat Inovatif
8	Kota Bengkulu	69,46	Sangat Inovatif
9	Kota Palembang	68,13	Sangat Inovatif
10	Kota Semarang	65,80	Sangat Inovatif
11	Kota Sukabumi	65,74	Sangat Inovatif
12	Kota Pariaman	65,31	Sangat Inovatif
13	Kota Probolinggo	64,01	Sangat Inovatif
14	Kota Padang Panjang	63,28	Sangat Inovatif
15	Kota Pekanbaru	62,86	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
16	Kota Jambi	62,36	Sangat Inovatif
17	Kota Surabaya	61,41	Sangat Inovatif
18	Kota Bima	61,30	Sangat Inovatif
19	Kota Surakarta	61,27	Sangat Inovatif
20	Kota Padang	61,17	Sangat Inovatif
21	Kota Banjarmasin	60,72	Sangat Inovatif
22	Kota Solok	60,46	Sangat Inovatif
23	Kota Tangerang	60,39	Sangat Inovatif
24	Kota Yogyakarta	60,35	Sangat Inovatif
25	Kota Tangerang Selatan	60,15	Sangat Inovatif
26	Kota Tegal	59,75	Inovatif
27	Kota Magelang	59,28	Inovatif
28	Kota Samarinda	59,20	Inovatif
29	Kota Denpasar	59,17	Inovatif
30	Kota Pare-Pare	57,85	Inovatif
31	Kota Pekalongan	57,84	Inovatif
32	Kota Pangkal Pinang	57,68	Inovatif
33	Kota Bogor	56,82	Inovatif
34	Kota Tidore Kepulauan	56,01	Inovatif
35	Kota Palopo	55,92	Inovatif
36	Kota Pontianak	55,81	Inovatif
37	Kota Bontang	54,83	Inovatif
38	Kota Metro	54,69	Inovatif
39	Kota Bitung	54,22	Inovatif
40	Kota Lubuklinggau	54,09	Inovatif
41	Kota Serang	54,03	Inovatif
42	Kota Batam	53,61	Inovatif
43	Kota Singkawang	53,33	Inovatif
44	Kota Madiun	52,62	Inovatif
45	Kota Kotamobagu	52,09	Inovatif
46	Kota Depok	51,12	Inovatif
47	Kota Palu	51,05	Inovatif
48	Kota Blitar	50,83	Inovatif
49	Kota Batu	49,78	Inovatif
50	Kota Langsa	49,69	Inovatif
51	Kota Gorontalo	49,30	Inovatif
52	Kota Bandung	49,14	Inovatif
53	Kota Banjarbaru	48,36	Inovatif
54	Kota Jayapura	48,08	Inovatif
55	Kota Kediri	47,63	Inovatif
56	Kota Banjar	47,54	Inovatif
57	Kota Palangka Raya	47,30	Inovatif
58	Kota Kendari	47,06	Inovatif
59	Kota Manado	46,98	Inovatif
60	Kota Tasikmalaya	46,70	Inovatif
61	Kota Malang	46,55	Inovatif
62	Kota Pasuruan	46,42	Inovatif
63	Kota Medan	44,77	Inovatif
64	Kota Tanjung Pinang	44,75	Inovatif
65	Kota Banda Aceh	44,58	Inovatif
66	Kota Salatiga	44,55	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
67	Kota Subulussalam	44,51	Inovatif
68	Kota Bukittinggi	44,16	Inovatif
69	Kota Ternate	43,60	Inovatif
70	Kota Sungai Penuh	42,96	Inovatif
71	Kota Cirebon	42,46	Inovatif
72	Kota Dumai	42,38	Inovatif
73	Kota Binjai	42,04	Inovatif
74	Kota Payakumbuh	41,47	Inovatif
75	Kota Gunungsitoli	40,34	Inovatif
76	Kota Padangsidempuan	39,45	Inovatif
77	Kota Cilegon	39,42	Inovatif
78	Kota Balikpapan	39,14	Inovatif
79	Kota Pagar Alam	38,75	Inovatif
80	Kota Ambon	38,38	Inovatif
81	Kota Tarakan	38,20	Inovatif
82	Kota Bau-Bau	37,52	Inovatif
83	Kota Lhokseumawe	36,38	Inovatif
84	Kota Tomohon	34,71	Kurang Inovatif
85	Kota Sabang	33,44	Kurang Inovatif
86	Kota Tanjung Balai	31,66	Kurang Inovatif
87	Kota Pematang Siantar	25,76	Kurang Inovatif
88	Kota Kupang	19,44	Kurang Inovatif
89	Kota Prabumulih	10,50	Kurang Inovatif
90	Kota Tual	10,40	Kurang Inovatif
91	Kota Tebing Tinggi	8,80	Kurang Inovatif
92	Kota Sibolga	8,00	Kurang Inovatif
93	Kota Sorong	0,40	Kurang Inovatif

Rekapitulasi Total

Pemerintah Daerah Sangat Inovatif : 75 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Inovatif : 329 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kurang Inovatif : 123 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Tidak Dapat Dinilai : 19 Pemerintah Daerah

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP,STP,M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A

Jabatan : Wali Kota Pematang Siantar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

KEPALA BAPPEDA,

DEDI IDRIS HARAHAHAP,STP,M.Si
NIP. 19811130 200312 1 003



WALIKOTA PEMATANG SIANTAR,

dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan	85 %
2.	Efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian pembangunan daerah	85 %
3.	Meningkatkan Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	606.882.098	
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	724.280.643	
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	34.835.822	
TOTAL		1.365.998.563	

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023
 KEPALA BAPPEDA,



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si
 NIP. 19811130 200312 1 003

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,



dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

KEPALA BAPPEDA,

DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
NIP. 198111302003121003

SEKRETARIS BAPPEDA,

RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc
NIP. 198110202000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,736,295,062	

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

KEPALA BAPPEDA,



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si
NIP. 198111302003121003

SEKRETARIS BAPPEDA,



RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc
NIP. 198110202000121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NITA SILITONGA, SH

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Riset dan Inovasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar,

2023

**Kepala Bappeda Kota Pematang
Siantar**

DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
NIP. 19811130200312003

**Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan Riset dan Inovasi**

NITA SILITONGA, SH
NIP. 19660607 199312 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85%
2.	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	606.882.098	
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	34.835.822	
TOTAL		641.717.920	

Pematang Siantar,

2023

**Kepala Bappeda Kota Pematang
Siantar**



DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

NIP. 198111302003121003

**Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan Riset dan Inovasi**



NITA SILITONGA, SH

NIP. 19660607 199312 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROLAN PANGGABEAN, SE
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 2023

Kepala Bappeda Kota Pematang

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi

Siantar

DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

ROLAN PANGGABEAN, SE

NIP. 19861123 200903 1 002

NIP. 19771208 200611 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD Bidang Perekonomian dan SDA	75%
2.	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD)	85%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75.044.015	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	461.732.385	
TOTAL		536.776.400	

Kepala Bappeda Kota Pematang Siantar



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si
NIP. 19861123 200903 1 002

Pematang Siantar, 2023

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi



ROLAN PANGGABEAN, SE
NIP. 19771208 200611 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIKI ZULIANSYAH, SAB, MM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prsarana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 2023

Kepala Bappeda Kota Pematang

Siantar

DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

NIP. 198111302003121003

Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan

Prasarana

VIKI ZULIANSYAH, SAB, MM

NIP. 19850723 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85%
2.	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	724.280.643	
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.150.000.000	
TOTAL		1.874.280.643	

Pematang Siantar,

2023

**Kepala Bappeda Kota Pematang
Siantar**

**Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan
Prasarana**




DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
NIP. 198111302003121003

VIKI ZULIANSYAH, SAB, MM
NIP. 19850723 200502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIA MINARMA POHAN, S.Pt, MP

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar,

2023

Kepala Bappeda Kota Pematang

Kepala Bidang Perencanaan Sosial

Siantar

dan Budaya

DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

YULIA MINARMA POHAN, S.Pt, MP

NIP. 19861123 200903 1 002

NIP. 19730730 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	75%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	87.102.328	
TOTAL		87.102.328	

Pematang Siantar,

2023

Kepala Bappeda Kota Pematang

Kepala Bidang Perencanaan Sosial

Siantar

dan Budaya




DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si

YULIA MINARMA POHAN, S.Pt, MP

NIP. 19861123 200903 1 002

NIP. 19730730 199803 2 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A
Jabatan : Wali Kota Pematang Siantar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

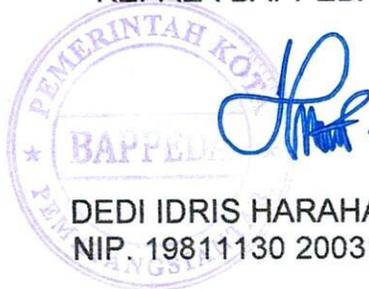
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

KEPALA BAPPEDA,



SUSANTI DEWAYANI, Sp.A



DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
NIP. 19811130 200312 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan	85 %
2.	Efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian pembangunan daerah	85 %
3.	Meningkatkan Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	606.882.098	
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	724.280.643	
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	34.835.822	
TOTAL		1.365.998.563	

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023
 KEPALA BAPPEDA,



dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si
 NIP. 19811130 200312 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

KEPALA BAPPEDA,


DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
NIP. 198111302003121003

SEKRETARIS BAPPEDA,


RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc
NIP. 198110202000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,736,295,062	

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

KEPALA BAPPEDA,



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si
NIP. 198111302003121003

SEKRETARIS BAPPEDA,



RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, M.Sc
NIP. 198110202000121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARIFUDDIN SARAGIH, SSTP, M.Si

Jabatan : Perencana Ahli Madya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kepala Bappeda Kota Pematang Siantar

Perencana Ahli Madya

Bappeda Kota Pematang Siantar



DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

NIP. 19811130200312003

SARIFUDDIN SARAGIH, SSTP, M.Si

NIP. 197907021998101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan	85%
2.	Efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian pembangunan daerah	85%

Kepala Bappeda Kota Pematang Siantar



DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
NIP. 198111302003121003

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Perencana Ahli Madya
Bappeda Kota Pematang Siantar

SARIFUDDIN SARAGIH, SSTP, M.Si
NIP. 197907021998101001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PATRIANA PUSPA MORADEWI HUTAGAOL, SH

Jabatan : Analis Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUNIAR EVA LINDA TAMPUBOLON, ST, MM

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

**Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Bappeda Kota Pematang Siantar**

JUNIAR EVA LINDA TAMPU BOLON, ST, MM
NIP. 197606172005022001

Analisis Tata Usaha

PATRIANA PUSPA MORADEWI HUTAGAOL, SH
NIP. 198209172006042005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

**Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Bappeda Kota**

Pematang Siantar



JUNIARA EVA LINDA TAMPUBOLON, ST, MM
NIP. 197606172005022001

Analisis Tata Usaha



PATRIANA PUSPA MORADEWI HUTAGAOL, SH
NIP. 198209172006042005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUNIAR EVA LINDA TAMPUBOLON, ST, MM

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, S.STP, M.Sc

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

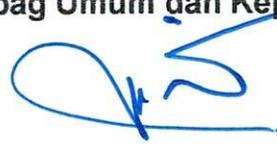
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

**Sekretaris Bappeda Kota Pematang
Siantar**

Kasubbag Umum dan Kepegawaian


RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, S.STP, M.Sc
NIP. 198110202000121001


JUNIAR EVA LINDA TAMPU BOLON, ST, MM
NIP. 19760617 200502 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.736.295.062	
TOTAL		5.736.295.062	

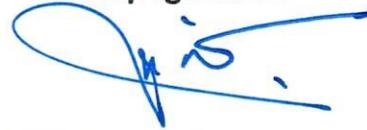
Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Sekretaris Bappeda Kota Pematang
Siantar

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, S.STP, M.Sc
NIP. 198110202000121001



JUNIAR EVA LINDA TAMPUBOLON, ST, MM
NIP. 197606172005022001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHIM DOLI PATUANSAKTI SIREGAR, S.STP, M.Si
Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUNIAR EVA LINDA TAMPUBOLON, ST, MM
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pematang Siantar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

JUNIAR EVA LINDA TAMPU BOLON, ST, MM
NIP. 19760617 200502 2 001

**Analisis Rencana Program dan
Kegiatan**

Rahim Doli Patuansakti Siregar, S.STP, M.Si
NIP. 19940527 201609 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



JUNIARA EVA LINDA TAMPUBOLON, ST, MM
NIP. 197606172005022001

Analisis Rencana Program dan
Kegiatan



Rahim Doli Patuansakti Siregar, S.STP, M.Si
NIP. 19940527 201609 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTRISNO

Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUNIAR EVA LINDA TAMPUBOLON, ST, MM

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

JUNIAR EVA LINDA TAMPU BOLON, ST, MM

NIP. 19760617 200502 2 001

Pengadministrasi Perencanaan dan

Program

SUTRISNO

NIP. 198305012009011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

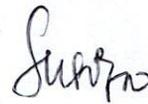


JUNIARA EVA LINDA TAMPU BOLON, ST, MM
NIP. 19760617 200502 2 001

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Pengadministrasi Perencanaan dan

Program



SUTRISNO

NIP. 198305012009011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVA SUSANTI
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUNIAR EVA LINDA TAMPUBOLON, ST, MM
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar,

2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

JUNIAR EVA LINDA TAMPU BOLON, ST, MM

NIP. 19760617 200502 2 001

Pengadministrasi Umum

EVA SUSANTI

NIP. 197710282012122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

Pematang Siantar,

2023

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



JUNIARA EVA LINDA TAMPUBOLON, ST, MM
NIP. 197606172005022001

Pengadministrasi Umum



EVA SUSANTI
NIP. 197710282012122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KURNIA DAULAY, SE

Jabatan : Kasubbag Keuangan Bappeda Kota Pematang Siantar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, S.STP, M.Sc

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar,

2023

Sekretaris Bappeda Kota Pematang Siantar

Kasubbag Keuangan

RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, S.STP, M.Sc
NIP. 198110202000121001

KURNIA DAULAY, SE
NIP. 19671009 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.736.295.062	
TOTAL		5.736.295.062	

Pematang Siantar, 2023

Sekretaris Bappeda Kota Pematang Siantar

Kasubbag Keuangan


RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, S.STP, M.Sc
 NIP. 198110202000121001


KURNIA DAULAY, SE
 NIP. 19671009 200801 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JERI RAHMAN PURBA

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Bappeda Kota Pematang Siantar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KURNIA DAULAY, SE

Jabatan : Kasubbag Keuangan Bappeda Kota Pematang Siantar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kasubbag Keuangan

KURNIA DAULAY, SE
NIP. 19671009 200801 1 001

Bendahara Pengeluaran

JERI RAHMAN PURBA
NIP. 19800422 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.736.295.062	
TOTAL		5.736.295.062	

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kasubbag Keuangan

Bendahara Pengeluaran


KURNIA DAULAY, SE
NIP. 19671009 200801 1 001


JERI RAHMAN PURBA
NIP. 19800422 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL SIAHAAN, SH

Jabatan : Penata Laporan Keuangan Bappeda Kota Pematang Siantar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KURNIA DAULAY, SE

Jabatan : Kasubbag Keuangan Bappeda Kota Pematang Siantar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kasubbag Keuangan

KURNIA DAULAY, SE
NIP. 19671009 200801 1 001

Penata Laporan Keuangan

ABDUL SIAHAAN, SH
NIP. 19781011 200701 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.736.295.062	
TOTAL		5.736.295.062	

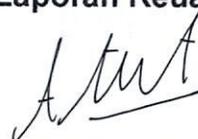
Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kasubbag Keuangan



KURNIA DAULAY, SE
NIP. 19671009 200801 1 001

Penata Laporan Keuangan



ABDUL SIAHAAN, SH
NIP. 19781011 200701 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MELINDA SIMANJUNTAK
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan Bappeda Kota Pematang Siantar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KURNIA DAULAY, SE
Jabatan : Kasubbag Keuangan Bappeda Kota Pematang Siantar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kasubbag Keuangan

Pengadministrasi Keuangan

KURNIA DAULAY, SE
NIP. 19671009 200801 1 001

MELINDA SIMANJUNTAK
NIP. 19741010 199402 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.736.295.062	
TOTAL		5.736.295.062	

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kasubbag Keuangan



KURNIA DAULAY, SE
NIP. 19671009 200801 1 001

Pengadministrasi Keuangan



MELINDA SIMANJUNTAK
NIP. 19741010 199402 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROLAN PANGGABEAN, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 2023

Kepala Bappeda Kota Pematang

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi

Siantar



DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

NIP. 19861123 200903 1 002

ROLAN PANGGABEAN, SE

NIP. 19771208 200611 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD Bidang Perekonomian dan SDA	75%
2.	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD)	85%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75.044.015	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	461.732.385	
TOTAL		536.776.400	

Kepala Bappeda Kota Pematang



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si
NIP. 19861123 200903 1 002

Pematang Siantar,

2023

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi

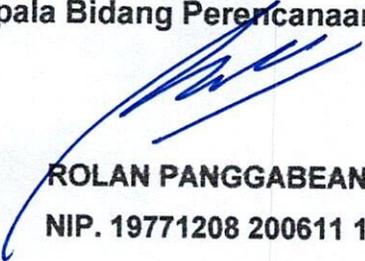
ROLAN PANGGABEAN, SE
NIP. 19771208 200611 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD Bidang Perekonomian dan SDA	75%
2.	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan	85%

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi


ROLAN PANGGABEAN, SE
NIP. 19771208 200611 1 001

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Analisis Perencanaan


FRENSI INNEKE SITUMORANG, SH, MM
NIP. 197503101995032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEMATANG SIANTAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSTI EDELINA AMBARITA, SH

Jabatan : Penyusun bahan Informasi dan Publikasi bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : NITA SILITONGA, SH

Jabatan : Kabid Penelitian, Pengembangan Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bappeda Kota Pematang
Siantar**

NITA SILITONGA, SH
NIP. 19660607 199312 2 001

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

**Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
Bappeda Kota Pematang Siantar**

RUSTI EDELINA AMBARITA, SH
NIP. 19741204 199602 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEMATANG SIANTAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85%
2.	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25

**Kabid Penelitian, Pengembangan
Riset dan Inovasi Bappeda Kota
Pematang Siantar**



NITA SITONGA, SH
NIP. 19660607 199312 2 001

**Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
Bappeda Kota Pematang Siantar**



RUSTI EDELINA AMBARITA, SH
NIP. 19741204 199602 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAISAL KURNIA PARDEDE

Jabatan : 19850611 200901 1 006

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NITA SILITONGA, SH

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Riset dan Inovasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kabid Penelitian, Pengembangan
Riset dan Inovasi Bappeda Kota
Pematang Siantar**

**NITA SILITONGA, SH
NIP. 19660607 199312 2 001**

Pematang Siantar, *21 Agustus* 2023
**Pengadministrasi Data, Penyajian dan
Publikasi**

**FAISAL KURNIA PARDEDE
NIP. 19850611 200901 1 006**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI DATA, PENYAJIAN DAN PUBLIKASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85 %
2.	Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	25

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kabid Penelitian, Pengembangan
Riset dan Inovasi Bappeda Kota
Pematang Siantar



NITA SILITONGA, SH
NIP. 19660607 199312 2 001

Pengadministrasi Data, Penyajian dan
Publikasi



FAISAL KURNIA PARDEDE
NIP. 19850611 200901 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMARA R.J. DAMANIK, SP, M.Ec, Dev

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kepala Bappeda Kota Pematang
Siantar

Analis Kebijakan Ahli Muda


DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
NIP. 198111302003121003


JAMARA R.J DAMANIK, SP, M.Ec, Dev
NIP. 197803212000031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	75%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	724.280.643	
TOTAL		724.280.643	

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kepala Bappeda Kota Pematang

Analisis Kebijakan Ahli Muda



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si
NIP. 198111302003121003

JAMARA R.J DAMANIK, SP, M.Ec, Dev
NIP. 197803212000031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IVAN DJUNDJUNGAN SILITONGA, M.M.

Jabatan : Perencana Ahli Madya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kepala Bappeda Kota Pematang Siantar



DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
NIP. 19811130200312003

Perencana Ahli Madya

Bappeda Kota Pematang Siantar

IVAN DJUNDJUNGAN SILITONGA
NIP. 197202102005021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan	85%
2.	Efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian pembangunan daerah	85%

Pematang Siantar, 21 Agustus 2023

Kepala Bappeda Kota Pematang Siantar



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si
NIP. 198111302003121003

Perencana Ahli Madya
Bappeda Kota Pematang Siantar

A blue ink signature is written in the space below the name of the second official.

IVAN DJUNDJUNGAN SILITONGA
NIP. 197202102005021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEMATANG SIANTAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRIANA MERDEKAWATI, SE, M.Si

Jabatan : Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, September 2023

Kepala Bappeda
Kota Pematang Siantar



DEDI IDRIS HARAHAHAP, STP, M.Si
NIP. 19811130 200312 1 003

Perencana Ahli Muda
Bappeda Kota Pematang Siantar

PUTRIANA MERDEKAWATI, SE, M.Si
NIP. 19820817 201001 2 047

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEMATANG SIANTAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap RKPD Bidang Perekonomian dan SDA	75 %
2.	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD dalam APBD)	85 %

Kepala Bappeda
Kota Pematang Siantar



DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si
NIP. 19811130 200312 1 003

Perencana Ahli Muda
Bappeda Kota Pematang Siantar

PUTRIANA MERDEKAWATI, SE, M.Si
NIP. 19820817 201001 2 047